

ALASAN KOREA SELATAN MEMBATALKAN GSOMIA DENGAN JEPANG

Dera Kartika Martha¹, Rendy Wirawan²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ *Corresponding author:* rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2024-01-07 | Accepted 2024-03-16 | Published 2024-05-25

Abstrak

Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) adalah pakta intelijen antara Jepang dan Korea Selatan mengenai pertukaran informasi dan teknologi terkait nuklir dan rudal Korea Utara. Namun, Korea Selatan mengumumkan untuk membatalkan perjanjian tersebut pada Agustus 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan membatalkan pakta intelijen GSOMIA pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada pembatalan yang terjadi pada tahun 2019 saja. Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus penelitian eksplanatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep setting dari Decision Making Theory oleh Snyder, Richard C, H.W Bruck, dan Burton Sapin. Hasil penelitian ini adalah tanggapan timbal balik Korea Selatan terhadap pembatasan bahan semikonduktor dan penolakan Jepang terhadap keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan.

Kata Kunci: GSOMIA, Pengaturan Internal, Pengaturan Eksternal, Jepang, Korea Selatan

WHY SOUTH KOREA CANCELED GSOMIA WITH JAPAN

Abstract

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) is an intelligence pact between Japan and South Korea regarding the exchange of information and technology related to North Korean nuclear and missiles. However, South Korea announced to cancel the agreement in August 2019. This research aims to explain the reasons why South Korea canceled the GSOMIA intelligence pact in 2019. This research focuses on the cancelled that happened in 2019 only. The approach used by the author in compiling this research is qualitative with an explanatory research focus. In this research, the author uses the setting concept from Decision Making Theory by Snyder, Richard C, H.W Bruck, and Burton Sapin. The results of this research are South Korea's reciprocal response to restrictions on semiconductor materials and Japan's rejection of the South Korean Supreme Court decision.

Keywords: GSOMIA, Internal Setting, Eksternal Setting, Japan, South Korea

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Dera Kartika Martha, Rendy Wirawan

1. PENDAHULUAN

GSOMIA atau *General Security of Military Inforamtion Agreement* merupakan kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan terkait pertukaran informasi dan teknologi militer terkait nuklir dan rudal milik Korea Utara. Awalnya perjanjian ini pernah dibahas dan akan ditandatangani pada tahun 2012, namun Lee Myung Bak yang merupakan presiden di tahun itu melakukan kerjasama tersebut tanpa diskusi publik dan tanpa melalui diskusi bersama Majelis Nasional. Korea Utara yang gencar melakukan provokasi untuk pengembangan nuklirnya dikawasan Asia Timur. Hal ini yang akhirnya mendorong Jepang dan Korea Selatan harus melakukan sebuah kerjasama militer sebagai negara yang berada pada satu kawasan dengan Korea Utara yang mengancam keamanan regional kedua negara. Adapun kerjasama militer tersebut bernama GSOMIA. Melalui pakta militer GSOMIA ini, Jepang akan mendapatkan informasi mengenai peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara, sedangkan Korea Selatan akan dibantu dengan teknologi Jepang untuk mengetahui jangkauan jatuhnya rudal dari Korea Utara.

Namun tepat satu jam sebelum penandatanganan, Korea Selatan memutuskan untuk menunda perjanjian tersebut. Keputusan ini diambil karena kerjasama militer antara Jepang dan Korea Selatan mendapatkan penolakan keras dari rakyat Korea Selatan dan partai oposisi. Rakyat Korea Selatan tidak ingin negaranya bekerjasama dengan Jepang, karena mereka menilai bahwa tidak sepatutnya memiliki kerjasama dengan mantan penjajah, khususnya dalam urusan keamanan.

Pada November 2016, di era pemerintahan Park Geun Hye, Jepang dan Korea Selatan kembali merundingkan pakta militer GSOMIA. Perundingan ini kembali dibahas akibat dari ancaman nuklir Korea Utara yang terus - menerus dilakukan pada tahun 2012 - 2016. Hasil dari perundingan tersebut, akhirnya GSOMIA disetujui dan ditandatangani pada 26 November 2016.

Isi dari perjanjian tersebut memungkinkan Jepang dan Korea Selatan untuk saling berbagi informasi intelijen terkait perkembangan nuklir di Korea Utara yang saat itu dipegang oleh presiden Korea Selatan Park Geun Hye dan Jepang Shinzo Abe. Selama durasi perjanjian kedua negara melakukan 29 kali pertukaran informasi. Keputusan kebijakan yang dibuat oleh masing - masing negara melibatkan pertimbangan kekuatan dalam sistem internasional, jaringan saling ketergantungan negara, dinamika politik global, dan lainnya dapat dibuktikan dengan dampak yang dihasilkan dari perjanjian GSOMIA, yaitu memberikan dampak yang baik bagi dinamika hubungan bilateral kedua negara.

GSOMIA mengacu pada perjanjian saling izin pertukaran informasi yang bersifat rahasia mengenai kebijakan militer antara dua negara, Jenis perjanjian ini memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan, termasuk dalam menghadapi situasi ancaman bersama seperti potensi ancaman militer, aktivitas terorisme, dan penyebaran senjata. GSOMIA memiliki signifikasinya yang memungkinkan Korea Selatan dan Jepang untuk bertukar informasi intelijen militer terkait ancaman bersama, baik dalam konteks ancaman regional maupun global. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan pefisiensi keua negaa dalam mengenali serta mengantisipasi potensi ancaman terhadap aspek keamanan di tingkat nasional maupun regional.

Menurut GSOMIA pasal 21 nomor 3, perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun setelahnya, kecuali salah satu pihak secara tertulis atau melalui pengumuman diplomatik mengumumkan pengakhiran 90 hari sebelum perpanjangan perjanjian. Artinya perjanjian ini akan diperpanjang otomatis selama Jepang atau Korea Selatan tidak mengajukan pengunduran diri

Pada 22 Agustus 2019, *Blue House* (Kantor Kepresidenan Korea Selatan) mengumumkan Korea Selatan untuk mengundurkan diri dari perjanjian militer GSOMIA (Mutiasari, 2019). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Korea Selatan untuk membatalkan pakta intelijen GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019.⁹

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teori Decision Making dari Richard Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan faktor

eksternal dapat menjadi penyebab, diambilnya keputusan ataupun kebijakan oleh orang – orang yang berwenang. Teori memiliki tujuan utama yaitu untuk memberi pengertian terhadap suatu fenomena di politik internasional berdasarkan keputusan yang dibuat oleh suatu negara (Synder, Bruck, & Sapin, 2002).

Setting dalam Teori Decision Making

Dalam teori *Decision Making*, Synder dan lainnya memiliki faktor – faktor yang kemudian mereka sebut sebagai *setting*, yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. *Setting* memberikan gambaran bagaimana seorang pembuat kebijakan merespons hingga bertindak sesuai dengan kondisi dan faktor yang mempengaruhi mereka baik internal dan eksternalnya (Synder, Bruck, & Sapin, 2002). Pembuat kebijakan yang dimaksud adalah negara, maka disini dijelaskan bagaimana suatu negara bertindak, dan merespon negara lainnya, serta mempertimbangkan kondisi dari pemerintahan dalam negara nya sendiri. *Setting* terbagi menjadi 2, yaitu *setting* internal dan *setting* eksternal. Kedua *setting* ini merupakan sebuah hubungan aksi – reaksi yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Setting Internal

Setting internal adalah bagaimana masyarakat berfungsi dan diorganisasikan, seperti opini, sikap publik, politik domestik, posisi geografis hingga kekuatan nasional. *Setting* internal memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi faktor terciptanya *setting* internal dalam sebuah negara, yaitu *Non-human environment*, *society*, dan *human environment* (Synder, Buck, & Sapin, 2002). Peneliti hanya akan menggunakan 2 faktor, yaitu *non- human environment* dan *human environment*

Non-human environment, adalah bagaimana suatu keadaan yang bukan disebabkan manusia dan tidak dibuat oleh manusia itu sendiri, yang dapat berdampak kepada kebijakan yang dihasilkan suatu negara. *Non-human environment* dapat dilihat dari beberapa aspek dari suatu negara, seperti posisi geografis atau kondisi perekonomian.

Human environment, bagaimana keadaan manusia di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan. Keadaan manusia ini dapat dinilai dari faktor budaya dan faktor populasi. Manusia sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan, secara luas dapat dilihat sebagai masyarakat dan pihak no-pemerintah.

Social structure and behavior, dapat diartikan sebagai, bagaimana struktur dan perilaku sosial dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara. Beberapa faktor yang digunakan dalam analisis *social structure and behavior* ini adalah *major common orientation value*, *major institutional pattern*, *major characteristics of social organization*, *role differentiation and specialization*, *groups: kinds and function*, dan *relevant social process*. Peneliti hanya akan memilih beberapa dari faktor tersebut untuk digunakan dalam menganalisis penelitian peneliti ini. Faktor yang peneliti pilih adalah *Relevant Social Process*. ***Relevant social process***, adalah bagaimana proses sosial yang relevan (seperti pembentukan opini, sosialisasi, dan politik) dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara.

Setting Eksternal

Setting eksternal dapat berupa aksi dan reaksi dari negara lain, yang merupakan suatu kondisi yang berada di luar wilayah suatu negara tersebut (Hara, 2011). Hal ini ditandai dengan keluarnya kebijakan baru di oleh suatu negara lain sebagai bentuk reaksi. Adapun beberapa faktor yang menciptakan *setting* eksternal dalam sebuah negara, diantaranya adalah *Non-human environment*, *Other cultures*, *other societies*, dan *Societies organized and Functioning as States and Government Actyion* (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002). Peneliti hanya menggunakan faktor *non-human environment*, *other cultures*, dan *societies organized and functioning as States* dari *setting* eksternal.

Non-human environment, adalah bagaimana suatu keadaan yang bukan merupakan buatan manusia dapat menjadi eksternal *setting*.

b. *Other cultures* atau kebudayaan negara lain merupakan faktor yang turut mempengaruhi perumusan kebijakan yang berasal dari budaya lain.

Societies Organized and Functioning as State and Government Action, merupakan tindakan suatu negara terhadap negara lain dimana tindakan tersebut menjadi bahan pertimbangan negara lain.

Peneliti akan menggunakan konsep *setting* dalam *Decision Making Theory*, yang dimana konsep tersebut terdiri dari *setting* internal dan *setting* eksternal yang merupakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi suatu keputusan, hingga tindakan dari negara. Dari analisis menggunakan konsep ini, kemudian peneliti akan memberikan hasil akhir berupa informasi terkait alasan Korea selatan membatalkan GSOMIA.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan level analisis negara, jenis penelitian yang penulis pilih untuk membahas rumusan masalah pada penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif, peneliti akan menggunakan data sekunder yang sumber – sumbernya berasal dari website pemerintah, jurnal, buku, dan e-book. Peneliti akan mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan menggunakan metode studi pustaka (*library state*). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Korea Selatan Membatalkan *General Security Of Military Information Agreement* (Gsomia) Jepang – Korea Selatan

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)

Pemerintah Korea Selatan memiliki beberapa alasan untuk bekerjasama dengan Jepang. Jepang memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan Korea Selatan, yaitu memiliki empat satelit intelijen yang sudah dioperasikan untuk memantau bagian utara dan kemampuan anti-kapal selam kelas dunia. Hal ini berarti penting bagi urgensi Korea Selatan terhadap perkembangan nuklir Korea Utara.

Meskipun GSOMIA masih mendapatkan kecaman, namun bagi pemerintah Korea Selatan beraliansi dengan Jepang melalui pakta intelijen tersebut, Korea Selatan mendapatkan keuntungan yang dapat memberikan rasa keamanan pada rakyatnya. Jepang memiliki kemampuan anti-kapal selam kelas dunia dan Jepang memiliki empat satelit intelijen yang dapat memantau semenanjung Korean.

Dibandingkan Korea Selatan, Jepang telah berinvestasi banyak terhadap pertahanan agar memiliki aset pengawasan dan deteksi yang unggul serta berbagai kemampuan intelijen dan analisis. Karena hal ini, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pun menganggap bahwa berbagi informasi secara tepat dengan Jepang akan membantu melacak dan menganalisis kemampuan nuklir Korea Utara.

Apabila Korea Selatan tidak bekerjasama dengan Jepang melalui GSOMIA, maka Korea Selatan akan kehilangan keuntungan - keuntungan seperti bantuan kapal selam Jepang dan satelit Jepang yang bisa menganalisis nuklir dan rudal milik Korea Selatan. Manfaat GSOMIA bagi Jepang juga jelas, yaitu Korea Selatan telah menandatangani perjanjian yang serupa dengan GSOMIA dengan 32 negara dan NATO, dimana Jepang memiliki perjanjian serupa hanya dengan 6 negara. Dengan kata lain, perjanjian dengan Korea Selatan merupakan hubungan strategis dan peluang untuk bekerjasama dengan negara lainnya. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki sumber daya intelijen manusia yang telah terlatih untuk menghadapi ancaman Korea Utara.

GSOMIA memiliki peran dalam mencegah penyebaran senjata pemusnah massal beserta teknologinya. Pertukaran informasi yang rahasia ini memberikan manfaat dalam mendeteksi serta menghambat upaya penyeludupan atau penyebaran senjata serta teknologi terkait yang melanggar hukum. Kolaborasi dalam bidang militer antara negara-negara mitra pun dapat ditingkatkan melalui GSOMIA, termasuk kerjasama dalam pelatihan, pelaksanaan latihan militer bersama, dan

pengembangan strategi pertahanan. Dikarenakan posisi geografis yang berdekatan, Korea Selatan dan Jepang menjalin kolaborasi melalui GSOMIA dalam aspek geopolitik. Bagi pemerintah Korea Selatan, melindungi keamanan nasional dan memberi rasa aman pada rakyat sebagai tanggapan atas ancaman nuklir dari Korea Utara adalah prioritas utama. Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pun menganggap bahwa berbagi informasi secara tepat dengan Jepang akan membantu melacak dan menganalisis lintasan peluncuran rudal balistik Korea Utara dan secara teknis menganalisis kemampuan nuklir Korea Utara. Meskipun begitu, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan juga mengatakan bahwa tidak semua informasi militer akan diberikan tanpa batas kepada Jepang, namun pertukaran informasi rahasia tersebut dilakukan setelah meninjaunya berdasarkan kasus per kasus berdasarkan prinsip timbal balik.

Alasan Korea Selatan Membatalkan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)

Setting Internal

Non Human Environment

Pembatalan kerjasama pakta intelijen tersebut diawali oleh pembatasan semikonduktor yang dilakukan oleh Jepang. Dominasi Jepang sebagai pemasok bahan utama semikonduktor ini sangat berpengaruh terhadap industri *smartphone* Korea Selatan. Korea Selatan mengekspor sekitar 70% dari *hydrogen fluoride* dan 90% *fluorinated polymade* dan *photoresits* yang merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri *smartphone* Korea Selatan.

Industri *smartphone* Korea Selatan sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, salah satunya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang signifikan sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Pemerintah Korea Selatan tentunya tidak ingin produksi dari industri *smarthphone* mereka berpengaruh kepada kerugian ekonomi. Korea Selatan pada akhirnya memilih untuk melakukan negoisasi dengan Jepang terkait masalah ini. Hal ini memiliki resiko yang lebih kecil untuk merugikan Korea Selatan, jika dibandingkan dengan mereka memberikan respon yang lebih agresif

Karena Pemerintah Korea Selatan mempercayai bahwa pembatasan yang dilakukan Jepang ini merupakan aksi balas dendam pemerintah Jepang terhadap keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 terkait ganti rugi pekerja paksa dan pembubaran Yayasan Rekoinsiliasi Comfort Women. Sehingga, Korea Selatan mengancam Jepang apabila pembatasan tersebut tetap dijalankan, maka Korea Selatan akan membatalkan pakta intelijen GSOMIA yang dimana kesuksesan penandatanganan pakta tersebut dilatarbelakangi oleh keberhasilan Jepang dan Korea Selatan menyelesaikan permasalahan Comfort Women dan upah kerja paksa.

Human Environment

Masyarakat Korea Selatan menilai pembatasan semikonduktor ini dilakukan oleh Jepang atas penolakan pemerintah Jepang terhadap gugatan Mahkamah Agung terkait kompensasi pekerja paksa. Keberhasilan penandatanganan pakta intelijen pada tahun 2016 memang didasari oleh urgensi Korea Selatan dan Jepang mengenai nuklir Korea Utara, namun dalam prosesnya terdapat penyelesaian – penyelesaian isu sejarah agar pakta intelijen tersebut dapat disetujui dan diterima oleh masyarakat. Sehingga hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan akan selalu bersinggungan dengan isu – isu sejarah.

Setelah Jepang mengumumkan untuk membatasi ekspornya, sebagian besar publik Korea Selatan menyatakan reaksi tidak senang. Bahkan hal ini memunculkan gerakan anti-Jepang di Korea Selatan dengan tagar “*#BoycottJapan*” yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun juga didukung oleh banyak *influencer* di Korea Selatan. Dalam gerakan tersebut masyarakat Korea Selatan menyerukan sekumpulan ajakan kepada seluruh masyarakat Korea Selatan untuk tidak menggunakan produk- produk asal Jepang serta mengajak untuk tidak melaksanakan dan membatalkan wisata ke negara tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat Korea Selatan sangat

mendukung rencana pembatalan pemerintah Korea Selatan terkait GSOMIA, karena permasalahan isu sejarah tersebut kembali terulang.

Social Structure and Behavior

Dalam respons Korea Selatan yang membantah tuduhan Jepang terkait adanya penyalahgunaan bahan kimia untuk kegiatan militer. Disini, selain Korea Selatan membantah tuduhan Jepang tersebut, terjadi juga *opinion formation* dari pihak Korea Selatan, yang mengatakan bahwa pembatasan ekspor Jepang adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebagai balasan dari tuntutan yang diberikan Korea Selatan.

Adult socialization, yang berkaitan dengan pemenuhan ekspektasi juga terjadi disini. Dimana, pemerintah Korea Selatan mencoba untuk memenuhi ekspektasi dari publiknya, bahwa mereka bisa menangani masalah ini, dan tidak akan tunduk dengan tuduhan Jepang tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat *political* sebagai sebuah proses sosial yang mewarnai hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, yang menjadikan hubungan antara kedua negara ini sangat sensitif, apalagi jika menyinggung masalah sejarah. Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan akan selalu bersinggungan dengan masalah sejarah.

Setting Eksternal

Non Human Environment

Jepang telah menjadi produsen dari bahan kimia yang dibutuhkan dalam industri *smartphone* di Korea Selatan sejak lama. Jepang telah berperan besar dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan, dimana presiden Park Chunghee yang secara tidak langsung membuat Korea Selatan dekat dengan perusahaan Jepang dan mulai mengandalkan Jepang sebagai produsen dari barang-barang yang mereka butuhkan untuk menjalankan produksi. Karena dominasi Jepang yang berlangsung lama ini, saat kebijakan pembatasan ekspor tersebut dikeluarkan oleh Jepang, Korea Selatan belum siap menghadapi kekurangan pasokan bahan baku tersebut.

Sehingga apabila sebenarnya Korea Selatan belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk memproduksi bahan kimia yang mereka butuhkan. Selain karena Korea Selatan masih kekurangan tenaga ahli dalam menghasilkan produk tersebut dan fasilitas Korea Selatan yang tidak dapat menghasilkan produk yang kualitasnya sama dengan yang dihasilkan oleh Jepang, Korea Selatan juga akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, jika mereka ingin memproduksi bahan kimia tersebut. Sehingga apabila sebenarnya Korea Selatan memiliki kemampuan produksi semikonduktor, maka Korea Selatan mungkin saja tidak mengancam pembatalan GSOMIA tersebut. Karena pembatasan ini akan sangat merugikan Korea Selatan dari faktor ekonomi, maka Korea Selatan berusaha bernegosiasi terhadap Jepang agar dibatalkan pembatasan tersebut dan apabila tidak dibatalkan maka Korea Selatan akan membatalkan GSOMIA. Dimana Korea Selatan menilai pembatasan ini dikarenakan isu sejarah, yaitu penolakan Jepang terhadap keputusan Mahkamah Agung terkait isu sejarah. Dimana GSOMIA merupakan perjanjian militer yang keberhasilan penandatungannya karena penyelesaian isu sejarah.

Other Cultures

Jepang sebagai bangsa yang menghormati leluhurnya, tidak senang apabila Korea Selatan selalu menyinggung tentang keburukan leluhur mereka, karena masyarakat Jepang beranggapan bahwa hal tersebut telah menjadi masa lalu, dan tidak ada hubungannya dengan generasi sekarang.¹⁶ Sama halnya dengan gugatan – gugatan yang dilakukan oleh Korea Selatan mengenai isu kerja paksa dan *comfort women*, karena Jepang menganggap hal tersebut telah diselesaikan pada perjanjian normalisasi tahun 1965. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Nikkei-TV Tokyo pada tahun 2019, 67% responden mendukung keputusan pemerintah Jepang untuk memberlakukan pembatasan ekspor, dan sisanya mereka belum memutuskan untuk mendukung keputusan pemerintahnya. Dukungan yang diberikan masyarakat Jepang kepada pemerintahnya, dapat dipahami sebagai *other society*, yang perannya adalah mendukung pembatasan ekspor oleh

pemerintah Jepang yang artinya membenarkan tuduhan bahwa Korea Selatan benar menyalahgunakan bahan-bahan kimia tersebut untuk kepentingan lain. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruhnya kepada kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan.

Societies Organized and Functioning as States and Government Action

Pertama Jepang melakukan pembatasan ekspor dengan alasan bahwa Korea Selatan telah mengirimkan bahan – bahan semikonduktor tersebut ke beberapa negara seperti Iran, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab. Namun, Korea Selatan meyakini pembatasan ini dikarenakan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2019. Keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan terkait korban kerja paksa dan keputusan Moon Jaein terhadap kesepakatan *comfort women*, tersebut dianggap oleh Jepang tidak masuk akal. Melalui Taro Kono, selaku Menteri Luar Negeri Jepang menyatakan keputusan tersebut melanggar perjanjian normalisasi tahun 1965 pasal 2, yaitu: "...menetapkan masalah properti, hak, dan kepentingan kedua pihak perjanjian dan warga negaranya (termasuk para hakim) dan klaim antara pihak perjanjian dan warga negaranya diselesaikan sepenuhnya dan "tidak ada pertikaian yang akan dibuat" berkaitan dengan klaim tersebut". Selanjutnya Jepang dan Korea Selatan melakukan pembahasan di tengah pertemuan trilateral di Cina. Korea Selatan mencoba melakukan negoisasi kembali dengan Jepang mengenai pembatalan kebijakan pembatasan ekspor bahan semikonduktor. Namun, dalam pertemuan ini Korea Selatan dan Jepang tidak menemukan jalan tengah. Penjabat Kemanan Nasional Korea Selatan, Kim Hyun Chong mengatakan Jepang tidak mengindahkan seruan Korea Selatan untuk berdialog dan langkah perdamaian lainnya guna menyelesaikan perselisihan perdagangan dan sejarah yang pahit. Jepang telah melanggar etika diplomatik sehingga merusak kebanggaan nasional Korea Selatan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa hal yang mendasari pembatalan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) adalah respon resprokal Korea Selatan terhadap pembatasan bahan semikonduktor yang dilakukan oleh Jepang, dimana pembatasan bahan tersebut dapat merusak keseimbangan ekonomi Korea Selatan. Pembatasan yang dilakukan oleh Jepang ini diyakini Korea Selatan sebagai aksi pembalasan terhadap rasa tidak puas Jepang atas gugatan Mahakamh Agung Korea Selatan pada tahun 2018. Sebelum mencapai keputusan pembatalan GSOMIA, Korea Selatan telah berusaha mengeluarkan beberapa respon terhadap pembatalan pembatasan ekspor tersebut agar pembatasan ekspor tersebut dapat dibatalkan oleh Jepang. Korea Selatan membantah tuduhan Jepang yang mengatakan Korea Selatan telah salah menggunakan bahan kimia yang mereka eskpor dengan digunakan untuk keperluan militer. Bantahan tersebut tidak membuat Jepang membatalkan pembatalan ekspor. Jepang justru menghapus Korea Selatan dari *whitelist*, Korea Sselatan lalu merespon Jepang dengan sedikit tegas, yaitu mengeluarkan Jepang dari *whitelist* Korea Selatan. Setelah itu, menteri luar negeri Jepang dan Korea bertemu di China untuk membahas perdagangan dan kemanan nasional, namun pembahasan ini tidak membuat hasil. Akhirnya melalui *Blue House*, Korea Selatan membatalkan pakta intelijen militer GSOMIA dengan alasan bahwa pakta tersebut bukanlah kepentingan nasional Korea Selatan bagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Boss. 2019. Japanese React To The Japan-South Korea]. Diambil kembali dari Youtube diakses pada 27 juni 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=d89JU5Efi6Y&list=LL&index=14>
- Asian Studies. 2019. "Teaching about the Comfort Women during World War II and the Use of Personal Stories of the Victims" diakses pada 27 juni 2024
- CNN Indonesia. "Perang Dagang, Menlu Korsel dan Jepang Janji Temu di China"<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190820181339-92-423137/perang-dagang-menlu-korsel-dan-jepang-janji-temu-di-china> diakses pada 27 juni 2024)
- <https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/teaching-about-the-comfort-women-during-world-war-ii-and-the-use-of-personal-stories-of-the-victims/> Berkowitz, Morton, dan Bock, P.G. American National Security. New York: Free Press, 1965. CNN Indonesia. 2019. *Perang Dagang, Menlu Korsel dan Jepang Janji Temu di China* diakses pada 27 juni

- 2024<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190820181339-92-423137/perang-dagang-menlu-korsel-dan-jepang-janji-temu-di-china>. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>
- Corby, Elowyn. 2011. "Koreans protest Japanese control in the "March 1st Movement," 1919" diakses pada 27 juni 2024 <https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/koreans-protest-japanese-control-march-1st-movement-1919>
- Duus, Peter. 1995. *The Abacus and The Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895- 1910*. Berkeley: University of California Press
- Harold, Scott W.. The Diplomat. 2019. "Why South Korea Should Rethink GSOMIA Withdrawal" diakses pada 3 September 2023. <https://thediplomat.com/2019/11/why-south-korea-should-rethink-gsomia-withdrawal/>
- Hwan, Jung In. Hankyoreh. 2016. "Despite criticism, South Korea signs GSOMIA with Japan." diakses pada 3 September 2023. http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/771627.html
- Jongsoo, L. 2019. *Trade Dependence and Politicization: Lessons From the Japan- Korea Conflict*. Diakses pada <https://thediplomat.com/2019/08/trade-dependence-and-politicizationlessons-from-the-japan-korea-conflict/>
- KBS WORLD Indonesia. 2019. "Korea Selatan Tidak Perpanjang GSOMIA dengan Jepang" diakses pada 27 Oktober 2023. http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&board_seq=369623 Korea Culture Center. 2015. "Tentang Korea" diakses pada 27 juni 2024. <https://id.korean-culture.org/id/1025/korea/672>
- Mutiasari, Tia. 2019. "Jepang, Korsel kembali berseteru soal perjanjian intelijen" diakses pada 27 juni 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/1179172/jepang-korsel-kembali-berseteru-soal-perjanjian-intelijen>
- Negishidi, Mayumi. 2019. *Japan Curbs Exports to South Korea, Hitting Global Chip Makers* diakses pada 27 juni 2024 <https://www.wsj.com/articles/japan-restricts-exports-to-south-korea-as-bilateral-ties-fray-11561953854>
- Sangbo, Park. 2016. "Implications of the General Security of Military Information Agreement for South Korea" diakses pada 27 juni 2024. <https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/>
- Saasti, Sofia Anindita. Kompasiana. 2019. *Kronologi Lengkap Perang Dagang Korea Selatan dengan Jepang*. diakses pada 3 November 2023. <https://www.kompasiana.com/sofiaanindita24/6353de5a375dd1285e4f4392/kr-onologi-lengkap-perang-dagang-korea-selatan-dengan-jepang>
- Shin-H. 2012. *Seoul Under Fire for Tokyo Military Pact*. diakses pada <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120628001308>
- Shin, J. H. 2019. *Why is Korea so dependent on Japanese materials?* Diakses pada 27 juni 2024 <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190711000653>
- Snyder, R. C., Sapin, B. & Bruck, H. W., 2002. *Foreign policy decision-making (revisited)* / Richard C. Snyder, H.W. Bruck, Burton Sapin; with new chapters by Valerie M. Hudson, Derek H. Chollet and James M. Goldgeier. First ed. New York: Palgrave
- Takeuchi, Y. 2019. *Japanese support deepens for South Korea trade curbs: Nikkei poll*. Diakses pada 27 juni 2024 <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/Japanesupport-deepens-for-South-Korea-trade-curbs-Nikkeipoll#:~:text=Japan%20restricted%20exports%20of%20vital,trusted%20trade%20partners%20in%20August.&text=The%20trade%20curbs%20received%20sup>
- Trefis, T. 2020. *How Does Samsung Make Money?* diakses pada 27 juni 2024 <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/01/02/how-doessamsung-make-money/?sh=6dc6de71123b>
- Wicaksana, I Gede. 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Revka Petra Media